



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3 Telpon (0362) 3301559 Singaraja

Email : inspektorat@bulelengkab.go.id

Website : <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Singaraja, 1 Agustus 2024

Nomor : B.700.1.2.5/911/ITDA/VIII/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan SPI 2024
dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan

Kepada
Yth. Seluruh Perangkat Daerah di
Lingkup Kabupaten Buleleng
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: B/4619/LIT.05/10-15/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Pembaharuan Informasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, dengan ini kami sampaikan bahwa Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024 akan dilaksanakan di Pemerintah Daerah dalam periode 29 Juli hingga 31 Oktober 2024. Survei ini akan dilakukan secara bertahap melalui dua pendekatan utama: Survei Daring yang akan disebarluaskan melalui pesan WhatsApp dan email blast, serta penggunaan QR Code untuk memfasilitasi responden partisipatif. Undangan untuk mengisi kuesioner secara daring akan dikirimkan melalui akun WhatsApp dengan nama "SPI 2024" yang dilengkapi dengan logo centang biru.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan SPI 2024, diharapkan Perangkat Daerah dapat melakukan langkah-langkah berikut:

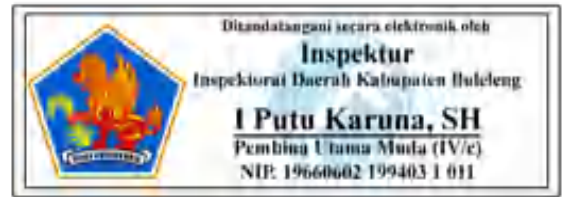
- Memfasilitasi akses dan informasi tentang SPI kepada pihak internal dan eksternal melalui penempelan QR-code SPI (terlampir) pada setiap layanan/lokasi tugas, serta mensosialisasikan secara aktif melalui media informasi Perangkat Daerah seperti laman web, media sosial, banner, dan TV monitor di tempat layanan;
- Menginformasikan kepada seluruh ASN dan Non ASN yang terpilih menjadi responden melalui pesan yang dikirimkan akun WhatsApp masing-masing agar berpartisipasi aktif mengisi kuesioner SPI 2024; dan
- Menjaga integritas pelaksanaan survei agar dapat berlangsung objektif serta memastikan kerahasiaan dan keamanan responden dalam proses pengisian kuesioner.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
3. Arsip.



Lampiran Surat

Nomor : B.700.1.2.5/911/ITDA/VIII/2023

Tanggal : 1 Agustus 2024

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan SPI 2024 dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan

QR-code SPI 2024

SYARAT MUDAH JADI
PAHLAWAN INTEGRITAS
#BERANIMENGISIHABISIKORUPSI

GOVERNMENT OFFICE
Pastikan kamu pernah mengurus layanan publik selama 1 tahun terakhir!

LAYANAN PUBLIK
Layanan publiknya apa aja sih?
Urus KTP di disaukcapil, izin usaha, vendor pengadaan pemerintahan dll.

SCAN
Jadi Pahlawan Integritas dengan scan barcode untuk daftar sebagai calon responden Survei Penilaian Integritas!

Survei Penilaian Integritas
Bersama Survei Penilaian integritas wujudkan perubahan nyata!

Tersedia pada Link :

https://drive.google.com/drive/folders/1fPMt-jxUZiqqHQO_v_hAgJjCqSQVLfxX?usp=sharing_eil_m&ts=668cd0f5



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/4619/LIT.05/10-15/07/2024

24 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Hal : Pembaharuan Informasi Pelaksanaan SPI 2024 Dan
Dukungan Pelaksanaan Kegiatan

**Yth. Sekretaris Daerah
c.q. Inspektur
(Daftar Pemerintah Kabupaten Terlampir)
di Tempat**

Sehubungan dengan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 dengan ini kami sampaikan beberapa pembaharuan informasi sebagai berikut, yaitu:

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024 berlangsung dalam periode 29 Juli- 31 Oktober 2024 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD).
2. Survei dilakukan secara bertahap melalui tiga pendekatan yaitu Survei Daring (*online*) melalui pesan *WhatsApp* dan *email blast*, *Computer Assisted Personal Interview (CAPI)* untuk Lembaga yang lokasinya memiliki karakteristik tertentu (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal/ 3T). Selain itu, survei juga menggunakan *QR Code* untuk responden partisipatif;
3. Undangan untuk mengisi kuesioner secara daring akan dikirimkan menggunakan akun *WhatsApp* dengan nama akun "SPI 2024" dengan logo centang biru.
4. KPK dalam melaksanakan SPI dibantu oleh Perguruan Tinggi dengan pembagian wilayah kerja sebagaimana terlampir. Adapun lingkup kegiatan Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. Koordinasi antar Instansi, pengumpulan data dan pembersihan data;
 - b. Pelaksanaan Survei CAPI di beberapa wilayah dan instansi;
 - c. Penelitian kualitatif dan rekomendasi pencegahan korupsi;
5. Survei menggunakan aplikasi milik KPK dengan alamat spi.kpk.go.id.
6. KPK dibantu oleh PT Marketing Sentratama Indonesia (*Frontier Group*) sebagai pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan survei melalui pengiriman *WA blast*;
7. KPK akan mengoptimalkan data pihak eksternal dalam rangka meningkatkan objektivitas hasil SPI dalam menilai kinerja anti korupsi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan integritas layanan publik. Atas hal ini, KPK berinisiatif melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan pembaruan dan penyempurnaan jika ada kekurangan/ketidakeengkapan data kontak responden;
 - b. mendorong KLPD mengoptimalkan partisipasi survei kepada eksternal dengan memberikan akses dan informasi tentang SPI misalnya melalui peletakan *QR-code* SPI pada setiap layanan/lokasi tugas yang bersentuhan dengan pihak eksternal yang bisa diisi secara mandiri setelah pihak eksternal selesai berhubungan dengan KLPD terkait atau upaya/inisiatif lainnya;

- peletakan QR-code SPI pada setiap layanan/lokasi tugas yang bersentuhan dengan pihak eksternal yang bisa diisi secara mandiri setelah pihak eksternal selesai berhubungan dengan KLPD terkait atau upaya/inisiatif lainnya;
- c. mendukung peningkatan partisipasi responden dan kredibilitas kegiatan dengan memberikan dukungan penyediaan materi atau/dan video komunikasi berupa testimoni Pimpinan Lembaga dan Pemangku Kepentingan terkait;
 - d. mendorong KLPD untuk melakukan upaya-upaya komunikasi bersama dalam rangka meningkatkan partisipasi, keamanan dan meyakinkan adanya tindak lanjut perbaikan pada responden internal (pegawai), eksternal (pengguna layanan dan vendor) serta eksper agar kegiatan dapat berjalan lancar. Termasuk diantaranya sosialisasi melalui media komunikasi KLPD seperti laman web, media sosial, banner dan tvtron di tempat layanan, serta press release tentang keikutsertaan KLPD dalam SPI melalui media massa yang menjadi jejaring biro humas masing-masing;
 - e. Membantu integritas pelaksanaan survei agar dapat berlangsung objektif dan menjaga kerahasiaan dan keamanan responden dalam mengisi;
8. KPK berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPI 2024 dengan mengacu pada standar metode dan integritas yang sudah ditetapkan. KPK akan melakukan pengendalian kualitas kegiatan yang dilakukan baik secara terbuka ataupun tertutup.

Ketidaksesuaian atas standar ataupun catatan integritas terkait pelaksanaan dan hasil dapat mengakibatkan nilai indeks KLPD tidak diproses atau diproses dengan catatan. Kami berharap proses pelaksanaan dapat berlangsung objektif, independen tanpa intervensi dengan semangat terhadap perbaikan/penguatan anti korupsi.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Timotius Hendrik Partohap (Timotius.Partohap@kpk.go.id) dengan nomor telepon (021) 25578300 ext. 7391 atau Sdri. Tara Shinta Ticola (TA.SPI3@kpk.go.id) melalui telepon 081213532945.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi,
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring,



Pahala Nainggolan

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Inspektur KPK

Lampiran Surat

Nomor : B/4618/LIT.05/10-15/07/2024

Tanggal : 24 Juli 2024

Daftar Undangan untuk Pemerintah Kota :

1. Kota Banda Aceh
2. Kota Medan
3. Kota Padang
4. Kota Palembang
5. Kota Bengkulu
6. Kota Jambi
7. Kota Pekanbaru
8. Kota Tanjung Pinang
9. Kota Pangkalpinang
10. Kota Bandar Lampung
11. Kota Serang
12. Kota Bandung
13. Kota Semarang
14. Kota Yogyakarta
15. Kota Surabaya
16. Kota Pontianak
17. Kota Banjarmasin
18. Kota Palangkaraya
19. Kota Samarinda
20. Kota Denpasar
21. Kota Mataram
22. Kota Kupang
23. Kota Manado
24. Kota Makassar
25. Kota Palu
26. Kota Kendari
27. Kota Gorontalo
28. Kota Ambon
29. Kota Tidore Kepulauan
30. Kota Jayapura
31. Kota Sabang
32. Kota Langsa
33. Kota Lhokseumawe
34. Kota Subulussalam
35. Kota Binjai
36. Kota Pematang Siantar
37. Kota Sibolga
38. Kota Tanjung Balai
39. Kota Tebing Tinggi
40. Kota Padang Sidempuan
41. Kota Gunungsitoli
42. Kota Bukit Tinggi
43. Kota Padang Panjang
44. Kota Payakumbuh
45. Kota Sawahlunto
46. Kota Solok
47. Kota Pariaman
48. Kota Dumai
49. Kota Sungai Penuh
50. Kota Prabumulih
51. Kota Pagar Alam
52. Kota Lubuk Linggau
53. Kota Metro
54. Kota Bekasi
55. Kota Bogor
56. Kota Cirebon
57. Kota Depok
58. Kota Sukabumi
59. Kota Tasikmalaya
60. Kota Cimahi
61. Kota Banjar
62. Kota Magelang
63. Kota Pekalongan
64. Kota Salatiga
85. Kota Surakarta
86. Kota Tegal
87. Kota Blitar
68. Kota Kediri
69. Kota Madiun
70. Kota Malang
71. Kota Mojokerto
72. Kota Pasuruan
73. Kota Probolinggo
74. Kota Batu
75. Kota Singkawang
78. Kota Banjarbaru
77. Kota Balikpapan
78. Kota Bontang
79. Kota Bitung
80. Kota Tomohon
81. Kota Kotamobagu
82. Kota Palopo
83. Kota Pare-Pare
84. Kota Bau-Bau
85. Kota Bima
86. Kota Tual
87. Kota Ternate
88. Kota Cilegon
89. Kota Tangerang
90. Kota Tangerang Selatan
91. Kota Batam
92. Kota Sorong
93. Kota Tarakan

Lampiran II. Penjelasan Lanjutan terkait Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) 2024

Berikut kami sampaikan penjelasan lanjutan dan rinci terkait pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024:

1. Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 akan dilaksanakan **secara online (e-SPI)** pada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dengan CAPI (*computer assisted personal interview*) untuk beberapa instansi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Pelaksanaan SPI 2024 berkolaborasi dengan 41 Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Rincian Perguruan Tinggi beserta daerah-daerah yang diampu dapat dilihat pada *Lampiran III*.

2. Sosialisasi dan Kampanye SPI 2024

Untuk meningkatkan angka responden pengisian survei SPI 2024, diperlukan sosialisasi dan kampanye SPI yang masih di lingkungan kerja K/L/PD & BUMN. Sosialisasi SPI dapat dilakukan dengan beragam bentuk, seperti:

- Surat edaran pelaksanaan SPI 2024 di wilayah kerja K/L/PD & BUMN.
- Sosialisasi tatap muka dan luring di lingkungan internal, eksternal dan eksper.
- FGD Pelaksanaan SPI 2024.
- Konten media sosial (Instagram, Facebook, Whatsapp story dan sebagainya) milik K/L/PD & BUMN dan Satuan Kerja/OPD dan pegawai K/L/PD.
- Video/iklan layanan masyarakat dari pimpinan tertinggi K/L/PD dan BUMN untuk mengajak responden terpilih untuk mengisi kuesioner daring.
- Menayangkan iklan layanan masyarakat di berbagai media/*platform* yang dimiliki oleh K/L/PD & BUMN seperti video tron, TV, radio, media cetak, media sosial dsb.
- Materi promosi fisik seperti spanduk, *billboard*, *x-banner*, poster dan lain sebagainya pada lingkungan kerja K/L/PD & BUMN seperti di kantor gubernur, kantor walikota, kantor pelayanan publik, kantor kelurahan dan kecamatan dan lain sebagainya.

-

3. Rincian lainnya.

- a. Tim SPI menyediakan barcode pendaftaran responden SPI bagi pengguna layanan publik yang ingin mendaftarkan diri secara mandiri. Silakan klik *link* bit.ly/DAFTARSPI24 atau scan barcode berikut:



- b. Materi SPI, Sosialisasi, aset publikasi, surat-surat dan template poster/banner dapat diunduh pada s.id/SPI24.








**PENANDATANGANAN
PERJANJIAN
KERJASAMA
PELAKSANAAN SPI
2024 DAN PELIBATAN
PERGURUAN TINGGI
DALAM UPAYA
PENCEGAHAN
KORUPSI**

Jakarta, 25 Juli 2024

1






**UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROV. ACEH**



PROV. ACEH	KAB. ACEH BARAT DAYA
KAB. SIMEULUE	KAB. ACEH TAMIANG
KAB. ACEH SINGKIL	KAB. NAGAN RAYA
KAB. ACEH SELATAN	KAB. BENER MERIAH
KAB. ACEH TENGGARA	KAB. PIDIE JAYA
KAB. ACEH TIMUR	KOTA BANDA ACEH
KAB. ACEH BARAT	KOTA SABANG
KAB. ACEH BESAR	KOTA LANGSA
KAB. PIDIE	KOTA LHOKEUMAWA
KAB. BIREUEN	KOTA SUBULUSSALAM
KAB. ACEH UTARA	

2

  UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PROV. SUMATERA UTARA 	
PROV. SUMATERA UTARA	KAB. KARO
KAB. NIAS	KAB. DELI SERDANG
KAB. MANDAILING NATAL	KAB. LANGKAT
KAB. TAPANULI SELATAN	KAB. NIAS SELATAN
KAB. TAPANULI TENGAH	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
KAB. TAPANULI UTARA	KAB. PAKPAK BHARAT
KAB. TOBA SAMOSIR	KAB. SAMOSIR
KAB. LABUHANBATU	KAB. SERDANG BEDAGAI
KAB. ASAHAN	KAB. BATU BARA
KAB. SIMALUNGUN	KAB. PADANG LAWAS UTARA
KAB. DAIRI	KAB. PADANG LAWAS



3

  UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PROV. SUMATERA UTARA 	
KAB. LABUHANBATU SELATAN	KOTA PEMATANG SIANTAR
KAB. LABUHANBATU UTARA	KOTA TEBING TINGGI
KAB. NIAS UTARA	KOTA MEDAN
KAB. NIAS BARAT	KOTA BINJAI
KOTA SIBOLGA	KOTA PADANGSIDIMPUAN
KOTA TANJUNG BALAI	KOTA GUNUNGSITOLI




4

KPK Kantor Perwakilan Kalimantan		UNIVERSITAS RIAU PROV. RIAU	
PROV. RIAU	KAB. ROKAN HULU		
KAB. KUANTAN SINGINGI	KAB. BENGKALIS		
KAB. INDRAGIRI HULU	KAB. ROKAN HILIR		
KAB. INDRAGIRI HILIR	KAB. KEPULAUAN MERANTI		
KAB. PELALAWAN	KOTA PEKANBARU		
KAB. SIAK	KOTA DUMAI		
KAB. KAMPAR			




5

KPK Kantor Perwakilan Kalimantan		UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI PROV. KEP. RIAU	
PROV. KEPULAUAN RIAU	KAB. LINGGA		
KAB. KARIMUN	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS		
KAB. BINTAN	KOTA BATAM		
KAB. NATUNA	KOTA TANJUNG PINANG		



6

		UNIVERSITAS ANDALAS PROV. SUMATERA BARAT	
PROV. SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK SELATAN		
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	KAB. DHARMASRAYA		
KAB. PESISIR SELATAN	KAB. PASAMAN BARAT		
KAB. SOLOK	KOTA PADANG		
KAB. SIJUNJUNG	KOTA SOLOK		
KAB. TANAH DATAR	KOTA SAWAHLUNTO		
KAB. PADANG PARIAMAN	KOTA PADANG PANJANG		
KAB. AGAM	KOTA BUKITTINGGI		
KAB. LIMA PULUH KOTA	KOTA PAYAKUMBUH		
KAB. PASAMAN	KOTA PARIAMAN		


7

		UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA TENGAH		
KAB. BANGKA	KAB. BANGKA SELATAN		
KAB. BELITUNG	KAB. BELITUNG TIMUR		
KAB. BANGKA BARAT	KOTA PANGKALPINANG		

8

		UNIVERSITAS JAMBI	
PROV. JAMBI		KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	
KAB. KERINCI		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
KAB. MERANGIN		KAB. TEBO	
KAB. SAROLANGUN		KAB. BUNGO	
KAB. BATANGHARI		KOTA JAMBI	
KAB. MUARO JAMBI		KOTA SUNGAI PENUH	

9

		UNIVERSITAS BENGKULU	
PROV. BENGKULU		KAB. MUKOMUKO	
KAB. BENGKULU SELATAN		KAB. LEBONG	
KAB. REJANG LEBONG		KAB. KEPAHANG	
KAB. BENGKULU UTARA		KAB. BENGKULU TENGAH	
KAB. KAUR		KOTA BENGKULU	
KAB. SELUMA			

10

  UNIVERSITAS LAMPUNG PROV. LAMPUNG 	
PROV. LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG
KAB. LAMPUNG BARAT	KAB. PESAWARAN
KAB. TANGGAMUS	KAB. PRINGSEWU
KAB. LAMPUNG SELATAN	KAB. MESUJI
KAB. LAMPUNG TIMUR	KAB. TULANG BAWANG BARAT
KAB. LAMPUNG TENGAH	KAB. PESISIR BARAT
KAB. LAMPUNG UTARA	KOTA BANDAR LAMPUNG
KAB. WAY KANAN	KOTA METRO

11

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA PROV. SUMATERA SELATAN 	
PROV. SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR
KAB. OGAN KOMERING ULU	KAB. OGAN ILIR
KAB. OGAN KOMERING ILIR	KAB. EMPAT LAWANG
KAB. MUARA ENIM	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KAB. LAHAT	KAB. MUSI RAWAS UTARA
KAB. MUSI RAWAS	KOTA PALEMBANG
KAB. MUSI BANYUASIN	KOTA PRABUMULIH
KAB. BANYUASIN	KOTA PAGARALAM
KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	KOTA LUBUK LINGGAU

12

  UNIVERSITAS INDONESIA KEMENTERIAN LEMBAGA 	
KEJAKSAAN AGUNG	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BANK INDONESIA	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
OTORITAS JASA KEUANGAN	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
BPJS KESEHATAN	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
BADAN PUSAT STATISTIK	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

17

  UNIVERSITAS INDONESIA KEMENTERIAN LEMBAGA 	
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	KEMENTERIAN PERTAHANAN
KOMISI YUDISIAL	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (KEPALA BAPPENAS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	DEWAN KETAHANAN NASIONAL

18

  INSTITUT PERTANIAN BOGOR KEMENTERIAN LEMBAGA DAN PROV. JAWA BARAT 1 	
KAB. BOGOR	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SUKABUMI	BPJS KETENAGAKERJAAN
KAB. CIANJUR	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KAB. PURWAKARTA	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
KAB. KARAWANG	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KAB. BEKASI	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KOTA BOGOR	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KOTA SUKABUMI	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
KOTA BEKASI	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
KOTA DEPOK	RADIO REPUBLIK INDONESIA

19

  INSTITUT PERTANIAN BOGOR KEMENTERIAN LEMBAGA DAN PROV. JAWA BARAT 1 	
KOMISI PENYIARAN INDONESIA	BADAN STANDARDISASI NASIONAL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
MAHKAMAH KONSTITUSI	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME


20

  INSTITUT PERTANIAN BOGOR KEMENTERIAN LEMBAGA DAN PROV. JAWA BARAT 1 	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
KOMISI KEJAKSAAN	SEKRETARIAT KABINET
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

21

  UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PROV. JAWA BARAT 2 	
PROV. JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU
KAB. BANDUNG	KAB. SUBANG
KAB. GARUT	KAB. BANDUNG BARAT
KAB. TASIKMALAYA	KAB. PANGANDARAN
KAB. CIAMIS	KOTA BANDUNG
KAB. KUNINGAN	KOTA CIREBON
KAB. CIREBON	KOTA CIMAHI
KAB. MAJALENGKA	KOTA TASIKMALAYA
KAB. SUMEDANG	KOTA BANJAR

22

  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PROV. JAWA TENGAH 1 	
PROV. JAWA TENGAH	KAB. BATANG
KAB. PURBALINGGA	KAB. PEKALONGAN
KAB. BANJARNEGARA	KAB. PEMALANG
KAB. KUDUS	KAB. TEGAL
KAB. JEPARA	KAB. BREBES
KAB. DEMAK	KOTA SALATIGA
KAB. SEMARANG	KOTA SEMARANG
KAB. TEMANGGUNG	KOTA PEKALONGAN
KAB. KENDAL	KOTA TEGAL


23

  UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET PROV. JAWA TENGAH 2 	
KAB. CILACAP	KAB. WONOGIRI
KAB. BANYUMAS	KAB. KARANGANYAR
KAB. KEBUMEN	KAB. SRAGEN
KAB. PURWOREJO	KAB. GROBOGAN
KAB. WONOSOBO	KAB. BLORA
KAB. MAGELANG	KAB. REMBANG
KAB. BOYOLALI	KAB. PATI
KAB. KLATEN	KOTA MAGELANG
KAB. SUKOHARJO	KOTA SURAKARTA

24

		UNIVERSITAS GADJAH MADA PROV. D.I. YOGYAKARTA	
PROV. D.I. YOGYAKARTA		KAB. CUNUNGGKIDUL	
KAB. KULON PROGO		KAB. SLEMAN	
KAB. BANTUL		KOTA YOGYAKARTA	


25

		UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA PROV. JAWA TIMUR 1	
KAB. BANGKALAN		KAB. PAMEKASAN	
KAB. SAMPANG		KAB. SUMENEP	

26

  UNIVERSITAS AIRLANGGA PROV. JAWA TIMUR 2 	
PROV. JAWA TIMUR	KAB. GRESIK
KAB. SIDOARJO	KOTA MOJOKERTO
KAB. MOJOKERTO	KOTA MADIUN
KAB. JOMBANG	KOTA SURABAYA
KAB. NGANJUK	KABUPATEN PACITAN
KAB. MADIUN	KABUPATEN PONOROGO
KAB. MAGETAN	KABUPATEN TRENGGALEK
KAB. NGAWI	KABUPATEN TULUNGAGUNG
KAB. BOJONEGORO	KABUPATEN BLITAR
KAB. TUBAN	KABUPATEN KEDIRI
KAB. LAMONGAN	KABUPATEN MALANG

27

  UNIVERSITAS AIRLANGGA PROV. JAWA TIMUR 2 	
KABUPATEN PASURUAN	KOTA MALANG
KOTA KEDIRI	KOTA PASURUAN
KOTA BLITAR	KOTA BATU

28

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



UNIVERSITAS JEMBER
PROV. JAWA TIMUR 3

Survei
Pembinaan
Integrasi

KAB. LUMAJANG	KAB. SITUBONDO
KAB. JEMBER	KAB. PROBOLINGGO
KAB. BANYUWANGI	KOTA PROBOLINGGO
KAB. BONDOWOSO	

29



30


















**PENANDATANGANAN
PERJANJIAN
KERJASAMA
PELAKSANAAN SPI
2024 DAN PELIBATAN
PERGURUAN TINGGI
DALAM UPAYA
PENCEGAHAN
KORUPSI**

Jakarta, 25 Juli 2024

31







**UNIVERSITAS UDAYANA
PROV. BALI**






PROV. BALI	KAB. BULELENG
KAB. JEMBRANA	KOTA DENPASAR
KAB. TABANAN	KAB. SIKKA
KAB. BADUNG	KAB. ENDE
KAB. GIANYAR	KAB. NGADA
KAB. KLUNGKUNG	KAB. MANGGARAI
KAB. BANGLI	KAB. MANGGARAI TIMUR
KAB. KARANGASEM	


32

  UNIVERSITAS MATARAM PROV. NUSA TENGGARA BARAT 	
PROV. NUSA TENGGARA BARAT	KAB. BIMA
KAB. LOMBOK BARAT	KAB. SUMBAWA BARAT
KAB. LOMBOK TENGAH	KAB. LOMBOK UTARA
KAB. LOMBOK TIMUR	KOTA MATARAM
KAB. SUMBAWA	KOTA BIMA
KAB. DOMPU	




33

  UNIVERSITAS NUSA CENDANA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 	
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. FLORES TIMUR
KAB. SUMBA BARAT	KAB. ROTE NDAO
KAB. SUMBA TIMUR	KAB. MANGGARAI BARAT
KAB. KUPANG	KAB. SUMBA TENGAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	KAB. SUMBA BARAT DAYA
KAB. TIMOR TENGAH UTARA	KAB. NAGEKEO
KAB. BELU	KAB. SABU RAIJUA
KAB. ALOR	KAB. MALAKA
KAB. LEMBATA	KOTA KUPANG


34

  UNIVERSITAS TANJUNGPURA PROV. KALIMANTAN BARAT 	
PROV. KALIMANTAN BARAT	KAB. KAPUAS HULU
KAB. SAMBAS	KAB. SEKADAU
KAB. BENGKAYANG	KAB. MELAWI
KAB. LANDAK	KAB. KAYONG UTARA
KAB. MEMPAWAH	KAB. KUBU RAYA
KAB. SANGGAU	KOTA PONTIANAK
KAB. KETAPANG	KOTA SINGKAWANG
KAB. SINTANG	




35

  UNIVERSITAS PALANGKA RAYA PROV. KALIMANTAN TENGAH 	
PROV. KALIMANTAN TENGAH	KAB. SERUYAN
KAB. KOTAWARINGIN BARAT	KAB. KATINGAN
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	KAB. PULANG PISAU
KAB. KAPUAS	KAB. GUNUNG MAS
KAB. BARITO SELATAN	KAB. BARITO TIMUR
KAB. BARITO UTARA	KAB. MURUNG RAYA
KAB. SUKAMARA	KOTA PALANGKARAYA
KAB. LAMANDAU	



36

  UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PROV. KALIMANTAN SELATAN 	
PROV. KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
KAB. TANAH LAUT	KAB. HULU SUNGAI UTARA
KAB. KOTABARU	KAB. TABALONG
KAB. BANJAR	KAB. TANAH BUMBU
KAB. BARITO KUALA	KAB. BALANGAN
KAB. TAPIN	KOTA BANJARMASIN
KAB. HULU SUNGAI SELATAN	KOTA BANJARBARU




37

  UNIVERSITAS MULAWARMAN PROV. KALIMANTAN TIMUR 	
PROV. KALIMANTAN TIMUR	KAB. PENAJAM PASER UTARA
KAB. PASER	KAB. MAHAKAM ULU
KAB. KUTAI BARAT	KOTA BALIKPAPAN
KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA SAMARINDA
KAB. KUTAI TIMUR	KOTA BONTANG
KAB. BERAU	




38

		UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	
PROV. KALIMANTAN UTARA	KAB. NUNUKAN		
KAB. BULUNGAN	KOTA TARAKAN		

39

		UNIVERSITAS TADULAKO	
PROV. SULAWESI TENGAH	KAB. BUOL		
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	KAB. PARIGI MOUTONG		
KAB. BANGGAI	KAB. TOJO UNA UNA		
KAB. MOROWALI	KAB. SIGI		
KAB. POSO	KAB. BANGGAI LAUT		
KAB. DONGGALA	KAB. MOROWALI UTARA		
KAB. TOLITOLI	KOTA PALU		

40

		UIN SYARIF HIDAYATULLAH KEMENTERIAN LEMBAGA	
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)		BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (BP TAPERA)	
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)			

41

	
---	---

42



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Survei Penilaian Integritas

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN SPI 2024 DAN PELIBATAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

Jakarta, 25 Juli 2024

43







**UNIVERSITAS HALU OLO
PROV. SULAWESI TENGGARA**





PROV. SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON UTARA
KAB. BUTON	KAB. KONAWE UTARA
KAB. MUNA	KAB. KOLAKA TIMUR
KAB. KONAWE	KAB. KONAWE KEPULAUAN
KAB. KOLAKA	KAB. MUNA BARAT
KAB. KONAWE SELATAN	KAB. BUTON TENGAH
KAB. BOMBANA	KAB. BUTON SELATAN
KAB. WAKATOBI	KOTA KENDARI
KAB. KOLAKA UTARA	KOTA BAUBAU




44

  UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PROV. GORONTALO 	
PROV. GORONTALO	KAB. BONE BOLANGO
KAB. BOALEMO	KAB. GORONTALO UTARA
KAB. GORONTALO	KOTA GORONTALO
KAB. POHUWATO	




47

  UNIVERSITAS NEGERI MANADO PROV. SULAWESI UTARA 	
PROV. SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
KAB. BOLAANG MONGONDOW	KAB. MINAHASA TENGGARA
KAB. MINAHASA	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KAB. KEPULAUAN SANGIHE	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KAB. KEPULAUAN TALAUD	KOTA MANADO
KAB. MINAHASA SELATAN	KOTA BITUNG
KAB. MINAHASA UTARA	KOTA TOMOHON
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	KOTA KOTAMOBAGU

48

		UNIVERSITAS SULAWESI BARAT PROV. SULAWESI BARAT	
PROV. SULAWESI BARAT	KAB. MAMUJU		
KAB. MAJENE	KAB. PASANGKAYU		
KAB. POLEWALI MANDAR	KAB. MAMUJU TENGAH		
KAB. MAMASA			

49

		UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON PROV. MALUKU	
PROV. MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN BARAT		
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR		
KAB. MALUKU TENGGARA	KAB. MALUKU BARAT DAYA		
KAB. MALUKU TENGAH	KAB. BURU SELATAN		
KAB. BURU	KOTA AMBON		
KAB. KEPULAUAN ARU	KOTA TUAL		

50

  UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE PROV. MALUKU UTARA 	
PROV. MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA TIMUR
KAB. HALMAHERA BARAT	KAB. PULAU MOROTAI
KAB. HALMAHERA TENGAH	KAB. PULAU TALIABU
KAB. KEPULAUAN SULA	KOTA TERNATE
KAB. HALMAHERA SELATAN	KOTA TIDORE KEPULAUAN
KAB. HALMAHERA UTARA	

51

  UNIVERSITAS CENDERAWASIH PROV. PAPUA 	
PROV. PAPUA	KAB. KEEROM
KAB. JAYAPURA	KAB. WAROPEN
KAB. KEPULAUAN YAPEN	KAB. SUPIORI
KAB. BIAK NUMFOR	KAB. MAMBERAMO RAYA
KAB. SARMI	KOTA JAYAPURA

52



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Survei
Penilaian
Integritas

Jakarta, 25 Juli 2024

